

RENJA 2024

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA & PERSANDIAN

PEMERINTAH KABUPATEN
SUKABUMI



diskominfo
kabupaten sukabumi

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Telp./Fax. (0266) 320255

Cikembang - Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Cikembang, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19670903 199601 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
4.1. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024	34
BAB V PENUTUP	39



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara untuk memfasilitasinya sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat dan keamanan informasi. dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada era keterbukaan informasi.

Aspek komunikasi, informatika dan dunia digital tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ketiga bagian dalam masa digitalisasi akan menjadi kemajuan peradaban Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Komunikasi Informatika dan Persandian dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum,

Sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus dimaksimalkan peranannya untuk mewujudkan kelancaran berkomunikasi dalam mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah dan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan tingkat SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD dirumuskan dalam program kegiatan, serta menentukan indikator dan target dalam dokumen perencanaan yang

merupakan penjabaran tugas dan fungsi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan tata Kelola Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang baik pemerintah kabupaten sukabumi membentuk dinas komunikasi informatika dan persandian sesuai dengan peraturan bupati sukabumi nomor 78 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sukabumi, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan dalam urusan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dengan fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam urusan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam urusan Komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- c. pemantauan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Bidang Aplikasi Informatika; Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; Bidang Statistik; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dinas;
- e. penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- f. penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten;
- g. penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan subdomain daerah kabupaten;
- h. penyelenggaraan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) daerah kabupaten;
- i. penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;
- j. penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik daerah kabupaten;
- k. penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi daerah kabupaten;
- l. penyelenggaraan statistik sektoral daerah kabupaten;
- m. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- n. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;

- o. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menyusun RENCANA KERJA 2023 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi berlandaskan :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Bupati Sukabumi No. 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi;
 26. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Diskominfo adalah dokumen perencanaan Diskominfo untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Diskominfo Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, selain dari hal tersebut penyusunan Renja Diskominfo bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Diskominfo tahun 2024.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan melibatkan Stakeholders Dinas tersebut untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja

Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2024 sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan informasi mengenai data rencana kerja yang akan dilaksanakan dan sumber dana pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun Anggaran 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi pada saat ini menganut Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

Evaluasi Renja tahun 2022 bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan pencapaian pada target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2024 dan sasaran RPJMD dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan dengan memerhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan dan tahunan sebagaimana realisasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024. Evaluasi terhadap realisasi dana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terhadap pagu indikatif. Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Kabupaten Sukabumi, dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan:

- a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
- b) Konsistensi antara RKPD Tahun 2024 dengan keberlanjutan RKPD 2024 dan RPJMD 2021- 2026 Pemerintah Kabupaten Skabumi.



- c) Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Sukabumi dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1. terlampir.



Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Pencapaian Renja SKPD Tahun 2022
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1			2	3	4	5	6	7
							19,360,025,542	19,167,466,404
01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							10,031,126,202	9,950,273,447
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah				22,774,700	22,072,700
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja	Dok	4	4	4,643,050	4,465,050
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	4	4	18,131,650	17,607,650
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah				5,620,672,053.40	5,619,221,847
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	5,601,343,053	5,599,892,847
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Tahunan	Dok	1	1	4,916,000	4,916,000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Triwulanan	Dok	4	4	13,800,500	13,800,500
	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	612,500	612,500
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				12,462,000	12,434,500
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	12	12,462,000	12,434,500
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Mendukung Terhadap Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah				15,463,975	15,463,600
	1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	12	12,150,875	12,150,500
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bulan	12	12	2,340,000	2,340,000
	3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	4	4	973,100	973,100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Mendukung Terhadap Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				833,716,374	823,165,506
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	Jenis	5	5	228,355,300	227,835,360
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	333,227,839	329,565,989
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Terpenuhi	Bulan	12	12	125,840,600	125,173,038
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	139,210,000	133,514,369
	5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	7,082,635	7,076,750
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Mendukung Terhadap Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,770,491,100	2,756,239,934
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	Bulan	12	12	426,940,000	415,920,127
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dai Majlis Talim pegawai Aparatur	Bulan	12	12	2,343,551,100	2,340,319,807
			Pegawai Non ASN, beserta jaminan kecelakaan, kematian dan kesehatan pegawai non ASN					

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur					755,546,000	701,675,360
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12		517,396,000	476,759,070
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12		208,150,000	195,279,311
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12		30,000,000	29,636,979
02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat		20	20		4,340,716,300	4,282,805,878
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						4,340,716,300	4,282,805,878
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Operasional Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Bulan	12	12		13,000,000	13,000,000
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Belanja Pembuatan Video Profil Daerah	Kali	2	2		893,439,000	887,261,800
		Belanja Pemeliharaan Billboard	Kali	2	2			
		Belanja Pembuatan Konten Videotron	Buah	12	12			
		Belanja Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Paket	1	1			
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bulan	12	12		946,472,300	894,889,078
		Belanja Pengadaan Videotron	Paket	2	2			
4	Pelayanan Informasi Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Bulan	12	12		18,900,000	18,900,000
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kali	2	2		65,984,000	65,834,000
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Bulan	12	12		2,402,921,000	2,402,921,000
03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase akses TIK yang tersedia		31	31		4,435,208,240	4,394,127,279
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2,165,513,000	2,159,457,500
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain	Bulan	12	12		13,734,000	13,734,000
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	Operasionalisasi Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bulan	12	12		2,151,779,000	2,145,723,500
		Belanja WMS Baru dan Instalasi	Paket	3	3			
		Penanganan Area Zero Blankspot	Titik	23	23			
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2,269,695,240	2,234,669,779
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Tenaga IT	Kali	3	3		26,368,000	26,368,000
		Sosialisasi Rencana Induk SPBE	Kali	1	1			
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jasa Sewa Rak Server + Manage + BackUp	Bulan	11	11		1,023,634,540	1,003,432,127
		Belanja VPN	Buah	8	2			
		Aktivasi VPN	Buah	2	2			
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Belanja Jasa Konsultasi Kajian Teknis Teknologi Informasi Sederhana	Paket	1	0		7,926,000	7,926,000
		Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Keamanan Informasi	Kali	2	2			
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Bulanan	Bulan	12	12		20,589,200	20,589,200

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belanja Lisensi Google Maps API	Unit	1	1	674,491,500	665,999,702
		Belanja Lisensi Office 365 subscription 6 user 1.6	Set	4	4		
		Belanja WHMCS Stater	Paket	3	3		
		Cpanel Premier Metal 3	Paket	3	3		
		Aplikasi Desa Kami	Aplikasi	1	1		
		Aplikasi Kami Ada	Aplikasi	1	1		
6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Bulan	12	12	29,907,000	28,117,000
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Desa dan Kota Cerdas	Paket	1	1	249,525,000	248,949,750
		Bimbingan Teknis Operator Layanan OpenSID	Kali	0	0		
		Pengembangan Aplikasi e-Damkar	Kali	1	1		
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	PelatihanGD - UX Designer Fundamental	Orang	1	1	213,729,000	209,813,000
		Pelatihan IT MGT - e-Government Essentials	Orang	2	2		
		Pelatihan IT MGT - Information System Auditor knowledge ready for Certification	Orang	2	2		
		Pelatihan IT MGT - IT Infrastructure Library Fundamental Knowledge for Certification V.4	Orang	1	1		
		Pelatihan IT MGT - IT Risk Management Knowledge	Orang	1	1		
		PelatihanPRG - HTML, CSS3 and JavaScript Programming	Orang	1	1		
		Pelatihan SC - Information System Security Protection Knowledge and Preparation for Certification (CISSP)	Orang	1	1		
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Bulan	12	12	23,525,000	23,475,000
01. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase penggunaan data statistik untuk pembangunan daerah		32	32	253,642,800	252,227,800
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					253,642,800	252,227,800
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen Kompilasi Statistik Sektoral	Dokumen	4	4	59,491,000	59,441,000
		Buku Profil Daerah	Buku	50	50		
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan mutu Statistik Daerah	Paket	5	5	48,620,000	48,620,000
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Meta Data Statistik Sektoral	Paket	1	1	113,043,000	111,678,000
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Paket	1	1	32,488,800	32,488,800
01. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase tingkat keamanan informasi		31	31	299,332,000	288,032,000
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					201,170,750	191,604,750
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Tentang Keamanan Informasi dan Persandian	Dokumen	1	0	53,117,250	51,829,250



2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diklat Information System Security Protection Knowledge and Preparation for Certification (CISSP), Information Security Management System (ISMS) lead to Implement ISO 27001 (1 paket = 1 jenis pelatihan)	Paket	7	7	105,877,000	97,779,000
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Bulan	12	12	42,176,500	41,996,500
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					98,161,250	96,427,250
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	Bulan	12	12	98,161,250	96,427,250

Selama kurun waktu 1 tahun Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.1.1. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Tahun 2022

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terdiri Kegiatan dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu jumlah informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah disampaikan secara cepat dan tepat dengan target capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar

1.140 realisasi pencapaian kinerja sebanyak 4.402 Informasi atau sebesar 386 %.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan target capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 17 Perangkat daerah realisasi pencapaian kinerja sebanyak 0 PD atau sebesar 0%, hal tersebut terjadi dikarenakan untuk dapat mengakomodir jaringan intra pemda diperlukan beberapa tahapan dimana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sedang menyiapkan infrastruktur pendukungnya terlebih dahulu.

2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Pada kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki 1 indikator kinerja, yaitu jumlah dokumen SPBE dengan target capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 1 dokumen, realisasi pencapaian kinerja sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Dilingkup Daerah Kabupaten

Pada kegiatan penyelenggaraan statistic sectoral memiliki 1 indikator kinerja, yaitu jumlah buku statistic sectoral dengan target capaian kinerja sebesar 200 Buku, realisasi capaian kinerja sebesar 50 buku atau sebesar 25%

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki 1 indikator kinerja, yaitu jumlah pengadaan sertifikat elektronik dengan target capaian kinerja sebesar 225 Sertifikat Elektronik, realisasi



capaian kinerja sebesar 1.148 Sertifikat Elektronik atau sebesar 1.140%. hal tersebut terjadi dikarenakan adanya percepatan penggunaan tanda tangan elektronik di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota memiliki 1 indikator, yaitu Jumlah Pola Hubungan Sandi yang di tetapkan dan pemeliharannya, dengan target 1 JKS, realisasi 0 JKS atau sebesar 0%. Hal ini terjadi dikarenakan sedang adanya kebijakan baru dari Badan Saber Sandi Negara sehingga pelaksanaan kinerja menjadi tertunda.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.

1. Pada output kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dapat tercapai dikarenakan untuk dapat mengakomodir jaringan intra pemda diperlukan beberapa tahapan dimana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sedang menyiapkan infrastruktur pendukungnya terlebih dahulu.
2. Pada output kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota tidak dapat tercapai. Hal ini terjadi dikarenakan sedang adanya kebijakan baru dari Badan Saber Sandi Negara sehingga pelaksanaan kinerja menjadi tertunda.
3. Pada output kegiatan penyelenggaraan statistic sectoral hanya dapat tercapai sebesar 25%, diakrenakan kekurangan alokasi anggaran.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki 1 indikator kinerja, yaitu jumlah pengadaan sertifikat elektronik dengan target capaian kinerja sebesar 225 Sertifikat Elektronik, realisasi capaian kinerja sebesar 1.148 Sertifikat Elektronik atau sebesar 1.140%. hal tersebut terjadi dikarenakan adanya percepatan penggunaan tanda tangan elektronik di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

2. Pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu jumlah informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah disampaikan secara cepat dan tepat dengan target capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 1.140 realisasi pencapaian kinerja sebanyak 4.402 Informasi atau sebesar 386 %. Hal tersebut didukung oleh peran aktif DKIP dan unsur pemerintah lainnya dalam memberikan layanan informasi yang cepat dan tepat bagi masyarakat.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

3.1.4.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luas dengan sumber daya yang terbatas di lingkup DKIP.
2. Belum terbentuknya Komitmen dan kepercayaan antar Perangkat Daerah terhadap Implementasi Satu Data Indonesia.
3. Kesulitan mendapatkan data yang sesuai dengan prinsip satu data.
4. Belum ada dukungan aplikasi yang memadai.

3.1.4.2 Faktor - faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu :

1. DKIP memiliki portal website, Aplikasi Digital terintegrasi BIMA SAKTI yang telah dilakukan perbaharuan menjadi aplikasi KAMI ADA dan aplikasi Layanan Desa Kami.
2. Pemanfaatan aplikasi E-Lapor yang responsive sebagai sarana menjawab keluhan masyarakat
3. Penyediaan layanan internet gratis pada beberapa tempat publik.
4. Diskominfo sudah mulai menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik secara bertahap dengan sumber daya yang ada.

3.1.4.3 Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Diskominfo melakukan percepatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
2. Peran aktif seluruh instansi terkait dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
3. Peran aktif antara instansi pemerintahan, stackholder dan masyarakat dalam penyebaran informasi.

3.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022

- Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Komunikasi, Informatika dan Persandian capaian setiap tahunnya telah mendekati baik dengan capaian target Renstra yang telah ditetapkan setiap tahunnya, hanya di tahun 2022 ini terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan beberapa factor internal maupun eksternal.
- Untuk dapat mempertahankan target minimal mendekati target awal restra, perlu adanya konsistensi dalam hal penganggaran, dan seleksi yang lebih ketat dalam melakukan pergeseran anggaran maupun perubahan anggaran.

3.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam perencanaan anggaran seluruh pihak hendaknya lebih fokus bijak dan selektif dalam pelaksanaan penganggaran kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan relevan dengan prioritas pembangunan agar proses penganggaran dapat dengan tepat menjawab apa yang menjadi proyek prioritas dan janji kepala daerah terpilih pada RPJMD tahun bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan 4 program yang berhubungan langsung dengan pencapaian kinerja baik pencapaian target proyek prioritas maupun pencapaian kinerja janji Bupati terpilih pada urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yaitu :

1. Program Aplikasi Informatika;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;



3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan;
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

TABEL 2.2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Tahun 2022			Capaian s.d. Akhir Periode RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN								
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.								
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		Poin	3.00	2.60			
	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	100.00	76.17	76.17	100	

(Capaian LKPJ 2022)

Indikator kinerja cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah diukur dengan jumlah wilayah blankspot internet (*Zero Blankspot*) sebanyak 92 titik/desa dengan capaian realisasi yang telah tertangani sebanyak 294 titik/desa.

TABEL 2.3
PROYEK PRIORITAS TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

PROYEK PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN 2022 (%)	
						K	Rp.
Zero Blank Spot Internet Area	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bandwich Jaringan	Titik (Desa)	100.00	99.86
Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan masyarakat dalam bentuk android	Aplikasi	100.00	99.75



				melalui aplikasi DESA KaMi.			
Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan dengan nama layanan kami ada	Aplikasi	100.00	99.85

(Capaian LKPJ 2022)

Indikator kinerja proyek prioritas Tahun Anggaran 2022 diukur dengan tiga indikator sebagai berikut :

1. Penanganan Zero Blankspot dengan target 23 titik/desa, realisasi 23 titik/desa.
2. Digitalisasi Pelayanan Publik (Desa dan Kabupaten) dengan target 1 aplikasi Desa Kami, realisasi 1 Aplikasi Desa Kami.
3. Integrasi Sistem Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital dengan target 1 Aplikasi Kami Ada, realisasi 1 Aplikasi Kami Ada.

TABEL 2.4
Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Eselon II)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	40	49	122
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	%	46	64	138
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	32	32	100

(Capaian LKPJ 2022)

TABEL 2.5
Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Eselon III)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022 (%)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	RP	Kinerja	Rp
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	20	4,340,716,300	39	4,282,805,878	193 %	98.67
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	31	4.435.208.240	43	4,394,127,279	139 %	99.07



2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	32	253,642,800	32	252,227,800	100%	99.44
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	31	299,332,000	50.73	288,032,000	164%	96.22
X	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	22,774,700	100	22,072,700	100	97
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	5,620,672,053	100	5,619,221,847	100	100
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	755,546,000	100	701,675,360	100	93
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	833,716,374	100	823,165,506	100	99
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	2,770,491,100	100	2,756,239,934	100	99
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	0	0	0	0	0
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	15,463,975	100	15,463,600	100	100



		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	12,462,000	100	12,434,500	100	99.78
--	--	--	---	-----	------------	-----	------------	-----	-------

(Capaian LKPJ 2022)

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dalam mengambil strategi arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting dibidang urusan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, adapun isu-isu tersebut diantara lain :

1. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah.
2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (e-government)
3. Kualitas jaringan telekomunikasi (internet) belum merapat di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 55 titik yang berstatus *blankspot area*.
4. Belum optimalnya keterisian data SIPD atau Opendata sebaga sarana ketersediaan data public di Kabupaten Sukabumi.
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat terhadap alat teknologi informasi sebagai faktor pendukung dalam era transformasi digital.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas

Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7). Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah memberikan pelayanan secara maksimal sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemanfaatan penggunaan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik) yang pada awalnya hanya di targetkan sebanyak 225 penggunaan Sertifikat Elektronik pada akhir tahun terealisasi sebanyak 1.484 Sertifikat Elektronik, pencapaian kinerja didukung dengan telah diterimanya penghargaan oleh Diskominfo sebagai sebagai penerapan TTE terbaik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Kategori Penggunaan TTE Terbanyak pada Sandikami Award Tahun 2022 oleh Gubernur Jawa Barat.
- b. Penanganan wilayah blankspot area yang tersebar di 23 titik telah terealisasi 100%.
- c. Peningkatan penilaian Indeks SPBE yang ditetapkan oleh Kementrian Reformasi Birokrasi yang selalu meningkat setiap tahunnya.
- d. Terpilihnya Kabupaten Sukabumi sebagai 50 Kota/Kabupaten untuk pendampingan Smartcity dan didukung oleh telah diterimanya Penghargaan Gerakan Menuju Smart City 2002 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

Rencana Kerja Diskominfo tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahun ke empat penunjang pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan isu strategis pada Diskominfo antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konsisten berdasarkan prioritas perangkat daerah sesuai indikator kinerja utama dan Proyek Prioritas;
- b. Belum semua perangkat daerah dan kecamatan memanfaatkan website sebagai sarana penyebaran informasi dan pelayanan publik;

- c. Intervensi penanganan sisa *blankspot area* yang telah terealisasi di lapangan ;
- d. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian informasi (*Hoax*) baik di facebook Instagram maupun media sosial lainnya khususnya pada wilayah yang belum terjangkau jaringannya seperti belum ada akses internet di daerah tersebut;
- e. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan kebutuhan pembuatan sistem aplikasi, website antar Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi;
- f. Perlunya penertiban akses jaringan internet (satu pintu) oleh pemerintah daerah dalam rangka pengamanan jaringan intra.
- g. Perlunya perhatian dari seluruh Perangkat Daerah terkait permasalahan, konflik/sengketa pengaduan masyarakat (*e-lapor*) khususnya di Kabupaten Sukabumi.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu :

- Misi Ketiga : “Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.”

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sedang dan akan dilakukan perluasan jaringan pada masing-masing daerah *blankspot* guna mendukung program nasional dibidang e-Government. Yang pada gilirannya akan memberikan peluang bagi Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan kota cerdas (*Smart City*).

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Tantangan :

1. Belum tersedia infrastruktur jaringan internet (lokasi *blankspot*) dan SDM TIK yang memadai.
2. Topologi Kabupaten Sukabumi yang beraneka raga dengan luas cakupan yang sangat luas

Peluang :

1. Memanfaatkan Era digital 4.0 saat ini untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

2. Terdapat RT RW Net yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi ikut berkontribusi dalam penanganan wilayah *blankspot* perlu untuk Pemerintah Daerah dukung baik dalam hal legalitas dan hal penting lainnya.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Masih terdapat 55 Blankspot Jaringan Internet.
2. Masih belum tersedianya jaringan intra di pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya pemanfaatan command center.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan KOMINFO.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat program dan kegiatan baru hasil dari musren kecamatan, kabupaten dan pikir dewan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian disajikan dalam tabel 2.6



Tabel 2.6
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Target Output	Pagu Indikatif	Target Output	Pagu Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian					20.573.955.640,00		20.573.955.640,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.523.955.640,00		14.523.955.640,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.333.831.240,00		13.333.831.240,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.753.149.240,00		5.753.149.240,00
1	2	1 0 2.0 6 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000,00		150.000.000,00
	2	1 0 2.0 6 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen
	2	1 0 2.0 6 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen
	2	1 0 2.0 6 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen
	2	1 0 2.0 6 1 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen
	2	1 0 2.0 6 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen
	2	1 0 2.0 6 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan
	2	1 0 2.0 6 1 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan
2	2	1 0 2.0 6 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.279.000,00	6.061.279.000,00
	2	1 0 2.0 6 1 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.000.000.000,00	37 Orang/bulan
	2	1 0 2.0 6 1 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen
	2	1 0 2.0 6 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.279.000,00	1 Laporan
	2	1 0 2.0 6 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan
	2	1 0 2.0 6 1 2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen
3	2	1 0 2.0 6 1 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.500.000,00	30.500.000,00
	2	1 0 2.0 6 1 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
								Target Output	Pagu Indikatif	Target Output	Pagu Indikatif
	2	1	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00
4	2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			157.000.000,00		157.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	8.000.000,00	10 Unit	8.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	99.000.000,00	3 Paket	99.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
5	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			622.641.440,00		622.641.440,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00	1 Paket	17.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.393.520,00	1 Paket	18.393.520,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	159.751.920,00	1 Paket	159.751.920,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.000.000,00	1 Paket	49.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.800.000,00	1 Laporan	7.800.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	345.696.000,00	1 Laporan	345.696.000,00
	2	1	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00
6	2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			398.974.800,00		398.974.800,00
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	144.000.000,00	3 Unit	144.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	99.944.800,00	25 Unit	99.944.800,00
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	93.530.000,00	7 Unit	93.530.000,00
	2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	61.500.000,00	1 Unit	61.500.000,00
7	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.267.524.000,00		3.267.524.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	981.000.000,00	1 Laporan	981.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.286.524.000,00	1 Laporan	2.286.524.000,00
8	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.115.230.000,00		1.115.230.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	598.940.000,00	18 Unit	598.940.000,00

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Target Output	Pagu Indikatif	Target Output	Pagu Indikatif
2	1602000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	393.290.000,00	13 Unit	393.290.000,00
2	1602006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	48.000.000,00	1 Unit	48.000.000,00
2	1602009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	75.000.000,00
9	21602	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.889.682.000,00		3.889.682.000,00
2	16021	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.889.682.000,00		3.889.682.000,00
2	160210001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00
2	160210002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00
2	160210004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	489.682.000,00	1 Dokumen	489.682.000,00
2	160210005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00
2	160210006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2	1602100010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00
2	1602100020	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.700.000.000,00	1 Dokumen	2.700.000.000,00
2	1603	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3.691.000.000,00		3.691.000.000,00
10	216031	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.585.000.000,00		1.585.000.000,00
2	160310001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	25.000.000,00	1 Domain	25.000.000,00
2	160310002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00
2	160310003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1.500.000.000,00	1 Unit	1.500.000.000,00
11	216032	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.106.000.000,00		2.106.000.000,00
2	160320001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
2	160320002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00
2	160320003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	150.000.000,00
2	160320004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		
				Target Output	Pagu Indikatif	Target Output	Pagu Indikatif	
	2.1.6.03.2.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	
	2.1.6.03.2.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	84 Perangkat Daerah	100.000.000,00	84 Perangkat Daerah	100.000.000,00	
	2.1.6.03.2.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	350.000.000,00	
	2.1.6.03.2.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	100.000.000,00	1 Layanan	100.000.000,00	
	2.1.6.03.2.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	291.000.000,00	1 Dokumen	291.000.000,00	
	2.1.6.03.2.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	415.000.000,00	1 Dokumen	415.000.000,00	
	2.2.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				440.124.400,00		440.124.400,00
	2.2.0.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				440.124.400,00		440.124.400,00
12	2.2.0.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				440.124.400,00		440.124.400,00
	2.2.0.2.1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	90.420.000,00	1 Dokumen	90.420.000,00	
	2.2.0.2.1.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	
	2.2.0.2.1.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	
	2.2.0.2.1.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	49.999.800,00	100 Orang	49.999.800,00	
	2.2.0.2.1.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	
	2.2.0.2.1.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	49.704.600,00	1 Dokumen	49.704.600,00	
	2.2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				750.000.000,00		750.000.000,00
	2.2.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				750.000.000,00		750.000.000,00
13	2.2.1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		600.000.000,00
	2.2.1.2.1.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.2.1.2.1.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	
	2.2.1.2.1.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		
				Target Output	Pagu Indikatif	Target Output	Pagu Indikatif	
2	2.0.0.000	2.1.2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	84 Perangkat Daerah	150.000.000,00	84 Perangkat Daerah	150.000.000,00
2	2.0.0.000	2.1.2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00		150.000.000,00
2	2.0.0.000	2.1.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	84 Perangkat Daerah	150.000.000,00	84 Perangkat Daerah	150.000.000,00
TOTAL						20.573.955.640,00		20.573.955.640,00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun disajikan dalam tabel 2.7

Tabel 2.7
 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
 Kabupaten Sukabumi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	
1	2	3	4	5	
<i>I</i>	Program Aplikasi Informatika				
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jl. Perintis kemerdekaan Cikembang Sukabumi	Akses Internet di Lokasi Blank Spot	23	Titik



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasiteknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten.

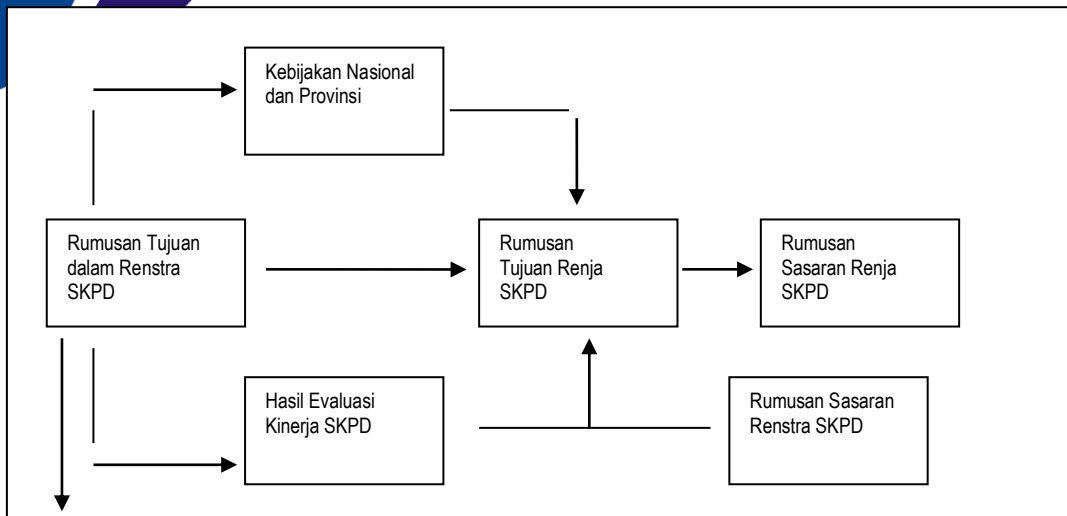
Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Sukabumi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Memperkuat Kelembagaan Dan Tatalaksana Pemerintahan Berbasiskan E-government		
2	Meningkatkan Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel Berbasis TIK		

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:



Dalam hal ini Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian juga memiliki tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas. (T3). Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :
2. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah.

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Berikut disajikan **Kebijakan** Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka didapatkan Target dan Capaian kinerja sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan pada Diinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai berikut:



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian 2. Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika 3. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area 4. Peningkatan Kualitas Informasi Publik 5. Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sectoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE; 2. Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang 3. Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang 4. Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan public 5. Pembangunan dan Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra 6. Peningkatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Data Statistik Sectoral

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berkontribusi dalam pencapaian target visi dan misi kepala daerah, dengan Visi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN”** dan salah satu dari 4 misi kepala daerah yaitu misi yang ke 3 **“MENINGKATKAN KONEKTIVITAS UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN WILAYAH”**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi, pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merumuskan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mensinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024, adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:



- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terdiri Kegiatan dari :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari Kegiatan :
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari Kegiatan :
1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
 2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Dilingkup Daerah Kabupaten
- E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun lalu (tahun 2022) dan hasil perencanaan pembangunan daerah di tahun 2024 dengan agenda prioritas **PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI POTENSI AGRIBISNIS DAN PARIWISATA**. Mengacu pada agenda prioritas pada tahun 2024 penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian disajikan dalam tabel 4.1. terlampir.

Tabel 4.1
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal RKPD	
									Target Output	Pagu Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00
2	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.279.000,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.000.000.000,00
	2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.279.000,00
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000,00
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00
3	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.500.000,00
	2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.500.000,00
	2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00
4	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			157.000.000,00
	2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	8.000.000,00
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	99.000.000,00
	2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	20.000.000,00
	2	16	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00
	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.000.000,00
5	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			622.641.440,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.393.520,00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	159.751.920,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.000.000,00
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.800.000,00
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	345.696.000,00
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00
6	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			398.974.800,00
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	144.000.000,00
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	99.944.800,00

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	93.530.000,00
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	61.500.000,00
7	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.267.524.000,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	981.000.000,00
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.286.524.000,00
8	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.115.230.000,00
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	598.940.000,00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	393.290.000,00
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	48.000.000,00
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00
9	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.889.682.000,00
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.889.682.000,00
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	0,00
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	50.000.000,00
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	489.682.000,00
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	500.000.000,00
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	100.000.000,00
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	50.000.000,00
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.700.000.000,00
	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3.691.000.000,00
10	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.585.000.000,00
	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	25.000.000,00
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1.500.000.000,00
11	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.106.000.000,00
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	300.000.000,00
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	150.000.000,00
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	100.000.000,00
	2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	84 Perangkat Daerah	100.000.000,00
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	350.000.000,00
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	100.000.000,00
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	291.000.000,00
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	415.000.000,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			440.124.400,00
	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			440.124.400,00
12	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			440.124.400,00
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	90.420.000,00
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 Orang	100.000.000,00
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	100.000.000,00
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	49.999.800,00
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	50.000.000,00
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	49.704.600,00
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			750.000.000,00
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			750.000.000,00
13	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000,00
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00

Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000,00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	150.000.000,00
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	84 Perangkat Daerah	150.000.000,00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	84 Perangkat Daerah	150.000.000,00
TOTAL								20.573.955.640,00

**BAB IV
PENUTUP**

1.1. Kesimpulan

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandiantahun 2024 mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2021-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Cikembang, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukabumi



EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19670903 199601 1 001



LAMPIRAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor.....

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarannya.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan :

a. sebagai

- a. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2024; dan
- b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 4

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pasal

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah per Triwulan setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 07 Agustus 2023



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 07 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 31 TAHUN 2023

TANGGAL : 07 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2024

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024**

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024;
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024;
5. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024;
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;
8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024;
9. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024;
10. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024;
11. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024;
12. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2024;
13. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024;
14. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
15. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024;
17. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024;
18. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2024;
19. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2024;
20. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
21. Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2024;
22. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024;
23. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2024;
24. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
25. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
26. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
27. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024;
28. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024;
29. Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2024;
30. Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2024;

31. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2024;
32. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2024;
33. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024;
34. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024;
35. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
36. Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2024;
37. Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2024;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2024;
39. Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2024;
40. Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2024;
41. Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2024;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2024;
43. Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2024;
44. Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2024;
45. Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2024;
46. Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2024;
47. Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2024;
48. Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2024;
49. Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2024;
50. Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2024;
51. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024;
52. Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2024;
53. Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2024;
54. Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2024;
55. Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2024;
56. Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2024;
57. Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2024;
58. Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2024;
59. Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2024;
60. Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2024;
61. Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuled Tahun 2024;
62. Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2024;
63. Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2024;
64. Rencana Kerja Kecamatan Ciambar Tahun 2024;
65. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2024;
66. Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2024;
67. Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2024;
68. Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2024;
69. Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2024;
70. Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2024;
71. Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2024;
72. Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2024;
73. Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2024;
74. Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2024;
75. Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2024;
76. Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2024;
77. Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2024;

78. Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2024;
79. Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2024;
80. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2024;
81. Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2024;
82. Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2024.


BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI